

TINJAUAN HISTORIS SIMBOL HARMONISASI ANTARA ETNIS TIONGHOA DAN MELAYU DI BANGKA BELITUNG

Meta Sya, Rustono Farady Marta,* Teguh Priyo Sadono
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Bunda Mulia
Jakarta - Indonesia

*Alamat korespondensi: rmarta@bundamulia.ac.id
DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v4i2.23517>

Diterima/ Received: 30 Mei 2019; Direvisi/ Revised: 2 November 2019; Disetujui/ Accepted: 8 November 2019

Abstract

This article discusses the historical background of the formation of the Bangka Belitung islands as a province full of harmonization symbols, namely ethnic Chinese and Malays (Thongin Fangin Jit Jong). Based on historical searches using primary and secondary sources, it can be concluded that the arrival of the Chinese in Bangka as miners has made a mixture of Chinese and Malay ethnic groups in Bangka. Then, the assimilation was expressed with an attitude of solidarity between the two, which began with the arrival of the white nation in Bangka, causing a resistance between ethnic Chinese and Malays through the Bangka War led by Depati Amir. This was done because of the feelings of oppression and suffering experienced by ethnic Chinese and Malays at that time. Then, the attitude of solidarity did not stop at that moment, but when Bangka Belitung struggled to break away from South Sumatra. The participation of the entire community of the Bangka Belitung Islands together struggled to be able to provide prosperity. Therefore, historical ties become very important media in the formation of the symbol of harmonization.

Keywords: *Thongin Fangin Jit Jong; Historical Tide; Regional Expansion, Ethnic Harmonization.*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang latar belakang sejarah pembentukan Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi dengan simbol harmonisasi yaitu etnis Tionghoa dan Melayu (*Thongin Fangin Jit Jong*). Berdasar penelusuran historis dengan menggunakan sumber primer dan sekunder, dapat disimpulkan bahwa kedatangan orang Tionghoa di Bangka sebagai buruh tambang telah membuat pembauran antara Etnis Tionghoa dan Melayu di Bangka. Kemudian, pembauran itu dinyatakan dengan sikap solidaritas di antara keduanya yang berawal dari kedatangan bangsa kulit putih di Bangka sehingga menyebabkan terjadinya perlawanan di antara etnis Tionghoa dan Melayu melalui Perang Bangka yang dipimpin oleh Depati Amir. Hal ini dilakukan karena adanya perasaan penindasan dan penderitaan yang dialami oleh etnis Tionghoa dan Melayu pada saat itu. Kemudian, sikap solidaritas itu tidak hanya berhenti pada saat itu saja, tetapi pada saat Bangka Belitung berjuang untuk melepaskan diri dari Sumatera Selatan. Peran serta seluruh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung bersama-sama berjuang agar mampu memberikan kesejahteraan. Oleh karena itu, ikatan historis menjadi media yang sangat penting dalam pembentukan simbol harmonisasi tersebut.

Kata Kunci: *Thongin Fangin Jit Jong; Ikatan Historis; Pemekaran Daerah; Harmonisasi Etnis.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal sebagai negara dengan kemajemukannya mulai dari suku, bangsa, bahasa, dan budaya. Keberagaman etnisitas menjadi salah satu kompleksitas di Indonesia secara horizontal yang tersebar dari wilayah

Sabang hingga Merauke (Satya & Maftuh, 2016: 10).

Etnisitas sering kali dijadikan alat adu domba demi kepentingan-kepentingan motif ekonomi atau politik tertentu. Ritaudin (2017:8) juga berargumentasi bahwa salah satu fenomena yang menarik dalam pergantian millennium

adalah masuknya isu-isu etnik dan agama dalam ranah politik, dan isu etnis juga rentan mencederai demokrasi di Indonesia dan memicu kecemburuan masyarakat yang plural. Selain itu, politik etnisitas juga merupakan kreasi negara yang monumental dalam rangka pelabelan warga negaranya (Haboddin, 2012:7).

Hal ini juga dibenarkan oleh Emil Salim dalam Zein (2000:4), yang mengungkapkan hal yang sama bahwa jika dilihat sejarahnya, persoalan konflik antara etnisitas memang telah berlangsung sejak masa kolonial. Pada saat itu, Hindia Belanda menetapkan orang Tionghoa sebagai *second class citizen* setelah orang Belanda dan Eropa. Sementara, *inlander* atau pribumi ditempatkan menjadi kelas ketiga. Akibatnya ketika bangsa Indonesia baru merdeka, pelampiasan kebencian kepada nonpribumi dirasakan sangat kuat karena etnis Tionghoa dianggap sebagai golongan yang berkolaborasi dengan penjajah.

Akan tetapi, salah satu pulau di Indonesia yaitu Pulau Bangka dengan keberagaman penduduknya, mampu menjaga keharmonisan di antara Etnis Tionghoa dan Melayu. Harmonis adalah keadaan dimana antara satu individu dengan individu lainnya saling seia sekata, atau dapat dikatakan perbedaan antara individu itu sudah terkikis oleh sikap tenggang rasa dan toleransi yang baik (Fernando & Marta, 2015:2). Etnis Tionghoa dan Melayu merupakan penduduk dengan jumlah terbesar di Pulau Bangka. Bangka Belitung memiliki komposisi penduduk etnis terbesar yaitu Melayu Bangka dan Belitung sekitar 69 persen dan Etnis Tionghoa dengan populasi 11 persen (Kavin, 2016:12).

Mereka saling berbaur dan menerima kebudayaan masing-masing. Keakraban antarbudaya antara Etnis Tionghoa dan Melayu, tampak pada pakaian pengantin perempuan dalam pernikahan Melayu Bangka dengan dominasi warna merah dan emas yang mirip dengan pengantin Tionghoa. Dahulu banyak perempuan Tionghoa mengenakan kain dan kebaya sebagai pakaian sehari-hari.

Selain itu, sejumlah kuliner Bangka membuktikan adanya keakraban antara kedua budaya ini dan membuat masyarakat di Pulau Bangka menyadari keberagaman yang mereka miliki

(Theo & Lie, 2014:3). Martabak manis atau biasa disebut Hok Lopan merupakan salah satu jenis kue warisan kuliner yang menampilkan jejak budaya Tionghoa yang pada perkembangannya sejalan dengan proses akulturasi budaya yang berlangsung di Bangka, kue ini juga menjadi salah satu jenis kue yang juga dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat yang ada di Bangka (Setiati, 2008:78).

Pengakuan akan kesamaan derajat dari fenomena budaya yang beragam itu tampak dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu (Marta, 2018:6). Ungkapan itu sendiri mengisyaratkan suatu kemauan yang kuat untuk mengakui perbedaan, tetapi sekaligus memelihara kesatuan atas dasar pemeliharaan keragaman, bukan dengan menghapuskannya atau mengingkarinya. Perbedaan dihargai dan dipahami sebagai realitas kehidupan, hal ini adalah asumsi dasar yang juga melandasi paham multikulturalisme.

Hal menarik yang juga ditemukan di Bangka adalah sangat jarang ditemui konflik di antara Etnis Tionghoa dan Melayu. Kekompakan hubungan Etnis Melayu dan Tionghoa di Bangka telah dibuktikan pada saat pecahnya kerusuhan Mei di Jakarta dan sejumlah tempat lainnya dimana penduduk etnis Tionghoa di Bangka benar-benar terlindungi (Permana, 2002:4). Bahkan sejarah Bangka juga tidak pernah mencatat adanya satupun kerusuhan rasial besar menimpa etnis Tionghoa karena hal ini tidak terlepas dari hubungan yang sudah lama terjalin antaretnis-etnis di Pulau Bangka (Theo & Lie, 2014:3).

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Sudirman, warga Melayu di Pasir Putih dalam kompas.com *Melayu-Tionghoa Bersaudara Tanpa Sekat* bahwa eratnya kebersamaan ini membuat hampir tidak ada konflik sosial yang melibatkan etnis di Bangka. Apalagi, pekerjaan yang ditekuni dan jenis rumah yang ditempati pun hampir sama, sehingga nyaris terbebas dari kecemburuan sosial.

Harmonisasi antar-warga Melayu dan Tionghoa di Bangka begitu kental dan mesra. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang orang-orang Bangka, sehingga masyarakat Bangka wajib merawatnya. Selain itu, antara Melayu Bangka dan masyarakat Tionghoa

sudah seperti dua sisi mata uang karena di pulau ini, kelompok masyarakat Tionghoa telah menyatu dengan tanah setempat selama ratusan tahun.

Selanjutnya dalam wawancara yang dilakukan dengan Elvian, sejarawan Bangka mengungkapkan bahwa fenomena menarik yang juga terjadi di Bangka adalah etnis Tionghoa dan Melayu bersatu dalam melawan penjajah Belanda karena mereka sama-sama menderita pada saat itu (Wawancara Elvian, 25 Januari 2019).

Tidak mengherankan jika muncul semboyan dalam bahasa Hakka *Thong Ngin Fan Ngin Jit Jong*, yang bermakna orang Tionghoa dan Melayu itu sama atau setara. Semboyan ini bukan hanya sekadar sebuah jargon, tetapi buah dari kehidupan bersama selama tiga ratus tahun lebih. Kekhasan pembauran yang terjadi antara etnis Tionghoa dan Melayu di Bangka bukan merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah yang terjadi di Pulau Bangka (Theo & Lie, 2014:4).

Terdapat beberapa kajian yang menganalisis mengenai simbol harmonisasi di masyarakat kepulauan. Kajian Susilowati dan Masruroh (2018:13-19) menganalisis upaya-upaya dalam merawat kebhinekaan yang dilakukan oleh warga bangsa yang berdomisili di pulau dengan mengambil dua contoh kasus di dua kepulauan yaitu Kepulauan Natuna dan Kepulauan Karimunjawa. Selanjutnya, Pageh (2018:1-11) yang mengetengahkan mengenai pemahaman tentang kearifan sistem keagamaan lokal dalam mengintegrasikan keberagaman agama di Bali. Kemudian, kajian yang dilakukan Idi (2012:1-23) yang berargumentasi bahwa hubungan antaretnis yang harmoni dapat terjadi secara alami tanpa ada “rekayasa” sosial sistematis, dan memberikan suatu pelajaran penting bagi Indonesia bahwa integrasi sosial dan harmoni sosial akan mungkin terjadi apabila struktur sosial ekonomi, politik, budaya, dan agama menunjukkan keseimbangan atau yang disebut sebagai “equilibrium” di tengah-tengah kehidupan masyarakat pluralistik Indonesia.

Beberapa kajian tersebut sebagai panduan kajian ini untuk mengetengahkan perspektif merawat keberagaman melalui sejarah yang ada di Bangka dalam berinteraksi untuk memperta-

hankan kerukunan dan interaksi sosial masyarakat etnis Tionghoa dan Melayu Bangka demi memperkuat kesatuan bangsa serta kaitan politik buruh dan etnisitas yang terjadi di Bangka. Akan tetapi, kajian ini lebih mengetengahkan pada peran nilai sejarah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Bangka, mulai dari Perang Bangka yang dipimpin oleh Depati Amir dan Pemekaran wilayah Pulau Bangka maupun Belitung menjadi provinsi. Berdasar dari perjalanan historis tersebut diketahui bahwa terdapat harmonisasi antara etnis Tionghoa dan Melayu, dalam ikatan yang disebut *Thong Ngin Fan Ngin Jit jong*, yang bermakna Melayu dan Tionghoa itu sama atau setara

METODE

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode historis. Dalam metode sejarah, seorang sejarawan yang ingin mengetahui suatu sejarah tertentu akan menggunakan prosedur penyelidikan yang sistematis yakni dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, yaitu pengumpulan bahan-bahan sejarah baik dari arsip dan perpustakaan (Abbas, 2014:35). Darmawan (2010: 145) menjelaskan bahwa metode historis Gottschalk (1975) dipahami sebagai suatu proses yang menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau dan menuliskan hasilnya berdasarkan fakta. Selain itu, ada beberapa langkah dalam metode penelitian sejarah ini, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Peneliti menggunakan berbagai sumber yang berupa bahan sejarah dari perpustakaan, jurnal yang sudah diterbitkan, surat kabar, dan terbitan resmi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Selain itu, peneliti menggunakan sumber yang berasal dari wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan sejarawan Bangka untuk memahami proses pembauran yang terjadi antara etnis Tionghoa dan Melayu. Wawancara juga dilakukan kepada orang-orang yang secara langsung mengalami peristiwa sejarah dalam pembentukan Bangka menjadi provinsi, dan sumber sekunder. Selanjutnya dilakukan kritik sumber, yaitu peneliti membandingkan apa yang diucapkan dengan apa yang tertulis di buku atau

berbagai sumber lainnya, sehingga sumber-sumber yang ada dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Setelah itu, peneliti melakukan interpretasi untuk saling mengaitkan antara satu fakta yang ditemukan dengan fakta lainnya. Terakhir, peneliti memaparkan kembali hasil dari penelitian sejarah mulai dari awal hingga berakhirnya sebuah peristiwa sejarah agar dapat mudah dipahami oleh pembaca yang lainnya.

BANGKA DALAM TINJAUAN HISTORIS

Kedatangan etnis Tionghoa di Pulau Bangka awalnya sebagai buruh tambang. Mereka sudah hadir sejak ratusan tahun lalu yaitu ketika Bangka di bawah kekuasaan Sriwijaya dan kedatangan Etnis Tionghoa ini dalam jumlah yang besar tercatat pada awal abad ke-18, yaitu saat ditemukan dan dibukanya tambang timah di Bangka (Idi, 2012: 362). Pada masa ini, kuli-kuli dari China terus berdatangan ke Bangka untuk bekerja di tambang timah.

Masyarakat Tionghoa mulai hadir di Bangka selama periode 1757-1776 atas kehendak Sultan Ahmad Najamuddin Adikusumo, putra Sultan Mahmud Badaruddin II, yang saat itu memimpin Kerajaan Sriwijaya (*Kompas*, 25 November 2011). Tujuan utama mendatangkan mereka adalah untuk meningkatkan produksi dan kualitas pengolahan timah, sebab warga Tionghoa dinilai lebih terampil dan sudah menguasai teknologi penambangan timah. Gelombang berikutnya didatangkan lagi para petani, tukang jahit, dan tukang kayu. Kehadiran beragam profesi itu dimaksudkan agar terjalin hubungan yang lebih luas antara warga asal China dan masyarakat setempat. Para warga asal China yang datang ke Bangka saat itu umumnya laki-laki dan tidak membawa keluarga. Seiring dengan perjalanan waktu, mereka pun akhirnya memilih bertahan di Bangka dengan menikahi perempuan-perempuan bumiputra dan Melayu.

Sama halnya dengan masyarakat bumiputra, Bangka menganut sistem sosial kemasyarakatan sebagaimana suku bangsa pada umumnya. Suatu hal yang biasa bagi masyarakat Bangka adalah melakukan kontak dengan dunia luar karena wilayah tempat tinggal orang Bangka kebanyakan menghuni wilayah pesisir dan bandar. Masyarakat pribumi Bangka memilih

alternatif untuk menerima budaya asing dengan syarat tidak merusak jati dirinya. Orang bumiputra memiliki sikap yang sangat ramah dan toleran, tetapi mereka akan melawan jika terdesak. Selain itu, perkawinan antara etnis Tionghoa dengan orang bumiputra, merupakan hal yang biasa, dan bahkan yang sering terjadi adalah etnis Melayu Bangka mengangkat anak dari Tionghoa untuk dibesarkan bahkan ada anggapan bahwa etnis Tionghoa di Bangka adalah keturunan perempuan bumiputra Bangka (Theo & Lie, 2014:3).

Tidak hanya sejarah kedatangan Tionghoa ke Pulau Bangka, yang menarik untuk ditelusuri sebagai penanda awal pembauran antara Etnis Tionghoa dan Melayu di Bangka. Akan tetapi, pembauran itu pun diwujudkan dengan sikap solidaritas di antara keduanya pada saat melawan pemberontakan yang dipimpin oleh Depati Amir. Bersatunya bumiputra Bangka dengan etnis Tionghoa melawan dapat membuktikan bahwa ada persatuan dan kesatuan antarbangsa dan antarsuku bangsa dalam bingkai kebhinnekaan. Kebhinnekaan suku, adat istiadat, agama dan budaya berhasil dipersatukan dan tetap dilanjutkan oleh orang Bangka hingga masa kini.

KUASA BANGSA ASING DI BANGKA

Persamaan senasib dan tempaan sejarah antara Tionghoa dan Melayu berawal pada saat kedatangan orang Eropa, yaitu pada 1722 Masehi, yang mulai menancapkan kekuasaannya di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam, termasuk di Pulau Bangka.

Kekuasaan Belanda di Bangka

Monopoli perdagangan lada sangat penting dilakukan oleh *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) karena harga dan permintaan terhadap komoditas lada sangat tinggi di Eropa. Selain itu, suplai lada di Eropa sering tidak lancar dan Portugis pada sekitar abad XVI yang mendominasi perdagangan rempah-rempah dunia memindahkan jalur distribusi lada di Eropa, tidak lagi melewati kota Antwerp di negeri Belanda.

Tidak hanya pada monopoli perdagangan lada saja, tapi di sektor timah juga (hak otroi) menguntungkan bagi VOC. Timah dapat dibeli dengan murah melalui Kesultanan Palembang

Darussalam dengan harga sebesar delapan ringgit per pikul, kemudian dijual di pasaran bebas dengan harga tinggi sekitar 16 ringgit perpikul.

Nawiyanto & Endrayadi (2016:96) memaparkan timah merupakan komoditas yang sangat bernilai, karena bahan ini sangat dibutuhkan Belanda untuk kegiatan industri dalam negeri dan negara Eropa lainnya. Itulah sebabnya, Belanda selalu berusaha membujuk Sultan Palembang, agar memberikan hak monopoli tersebut. VOC berasalan, bahwa kedatangan mereka untuk menghapus sistem pajak Timah Tiban dan Tukon yang tidak sesuai dengan rasa keadilan. Akibatnya, dampak yang diterima oleh Pulau Bangka sejak Belanda berkuasa melalui serikat dagang VOC di Pulau Bangka, dari 1717 Masehi hingga 1799 Masehi adalah kekayaan timah di Bangka telah dikirim dan dikeruk sebanyak 64.187,60 ton timah.

Kekuasaan Perancis di Bangka

Setelah Belanda, Pulau Bangka kemudian dikuasai oleh Perancis Hindia Belanda di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willen Daendels berlangsung sampai dengan tanggal 24 April 1811 dan kemudian dilanjutkan oleh Jan Willem Janssens hingga *Kapitulasi Tuntang* 18 September 1811 (Palmaya, Wakidi, & Ekwandari, 2017:2). Mawaddah (2017:151) juga menjelaskan sejak adanya Kapitulasi Tuntang, pemerintahan untuk sementara dipegang oleh Jenderal Thomas Stamford Raffles.

Farida (2007) mengungkapkan lebih lanjut bahwa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, telah dilakukan perubahan terhadap daerah-daerah kekuasaannya, termasuk Palembang. Perubahan tersebut meliputi bentuk perdagangan monopoli dari sistem pembayaran kontan menjadi hutang atau barter dengan beras, bahkan harga timah akan diturunkan.

Kekuasaan Inggris di Bangka

Berakhirnya kekuasaan Perancis di Indonesia, maka pulau Bangka berada di bawah kekuasaan Inggris dan menjadi bagian dari *East India Company* (EIC), yang dikenal sebagai Serikat Dagang Inggris di Hindia Timur. Tindakan berikutnya yang dilakukan oleh Inggris adalah

Raffles yang menjabat sebagai Agent to Governor General, mengirim utusan ke Palembang untuk mengurus pengambil alihan Kantor Dagang Hindia Belanda hingga mekanisme monopolinya.

Seperti yang dijelaskan dalam Hazmirullah (2016:11) bahwa pada 19 Oktober 1810, Lord Minto menunjuk Thomas Stamford Raffles 20 sebagai *agent to the Governor-General with the Malay States* (wakil gubernur jenderal untuk [urusan] dengan negeri-negeri Melayu). Tugas utamanya adalah menyiapkan segenap data yang berkaitan dengan seluk beluk tanah Melayu (termasuk kekuatan musuh) serta berkoordinasi sekaligus menggalang dukungan para penguasa lokal.

Pada saat Inggris berkuasa, Pulau Bangka dibagi menjadi tiga divisi yang cenderung lebih didasarkan pada wilayah eksplorasi atau penambangan timah, dibandingkan berdasar pada kepentingan pemerintahan. Divisi-divisi tersebut dibagi kedalam tiga wilayah, yaitu; bagian utara mencakup wilayah Jebus, Belinyu, Sungailiat, Merawang, (merupakan wilayah Kabupaten Bangka) (Rahayu, 2016:18). Kemudian, bagian wilayah Barat Pulau Bangka meliputi wilayah Mentok, Belo, Kotawaringin. Terakhir, wilayah Bagian Timur pulau Bangka yang meliputi hampir separuh Pulau Bangka yaitu Pangkal Pinang, Sungaiselan, Bangkakota, Paku, Permis, Olim, dan Toboali.

Adapun upaya untuk meningkatkan produksi olahan timah dan memperkenalkan cara penambangan hingga pengelolaan timah di Pulau Bangka, Raffles mengutus Dr. Horsfield untuk mengadakan penelitian. Kathirithamby-Wells (2009:2) menjelaskan bahwa dalam setiap karya buku yang dibuat, Raffles memilih daerah-daerah untuk diambil bahan-bahan observasi alam dan pengolahan data oleh Horsfield. Inggris juga melakukan beberapa strategi untuk menarik hati rakyat Bangka. Pertama, Inggris menghapus sistem pajak Timah Tiban dan Tukon yang dianggap tidak adil, karena hanya dibebankan kepada orang bumiputra Bangka. Berikutnya, Pemerintah Inggris mengadakan perundingan dengan kepala-kepala parit dan kongsi-kongsi penambangan untuk meningkatkan produksi timah di pulau Bangka dan kemudian disepakati penjualan timah dengan harga baru. Ketiga,

mereka bebas dari ongkos melebur dan mengangkut serta pelunasan hutang. Selanjutnya, pemerintah juga memberi bantuan biaya pembukaan tambang baru, membayar pekerja tambang dengan upah yang lebih tinggi dalam mata uang yang dapat dipertukarkan, dan melantik opsir dari etnis Tionghoa. Terakhir, pemerintah juga membangun gedung baru dan tanur-tanur untuk peleburan timah, tetapi ongkos pembuatan parit-parit penambangan timah sementara ditanggung oleh kepala parit.

Masa kekuasaan Inggris di Pulau Bangka tidak berlangsung lama, karena berdasar Traktat (konvensi) London, Belanda kembali berkuasa atas wilayah Hindia Belanda. Di sisi lain, kebijakan Pemerintah Inggris memberikan dampak yang besar bagi pola penambangan dan pengelolaan timah di Pulau Bangka. Seluruh proses serah terima daerah kekuasaan antara Inggris dan Belanda dilaksanakan pada 10 Desember 1816 di Kota Muntok (Elvian, 2009:9). Penyerahan tersebut mendapat protes dari Raffles karena ia sangat mengerti akan pentingnya posisi strategis Pulau Bangka pada masa itu.

BANGKA KEMBALI KE BELANDA

Jayani (2014:22) menuliskan bahwa yang mendatangi Traktat London tanggal 17 Maret 1842 adalah dari Belanda diwakili oleh Hendrik Fagel dan Anton Reinhard sedangkan Inggris diwakili oleh George Canning dan Charles William Wyan. Pulau Bangka diserahkan Pemerintah Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda sebagai ganti Cochin yang terletak di Kerala India.

Kembalinya kekuasaan Belanda di Bangka menjadi awal mula terjadinya Perang Bangka yang dipimpin oleh Depati Amir, karena adanya monopoli pertambangan timah yang sangat merugikan kepentingan rakyat Bangka (Elvian, 2016a:193). Harga resmi timah yang ditetapkan Pemerintah Hindia Belanda dengan yang berlaku di pasaran bebas sangat mencolok, sehingga mengakibatkan penyelundupan dan penjarahan terhadap parit-parit (area penambangan) oleh perompak yang berkeliaran di perairan, sehingga menyebabkan kekacauan di berbagai pelosok Pulau Bangka.

Asimilasi antaretnis sejatinya memang tetap menghargai aspek-aspek pluralism yang terdapat dalam dua kelompok etnis yang berinteraksi secara asimilatif itu (Kusuma & Sari 2015:5). Masyarakat Tionghoa dan Melayu di Bangka kiranya telah berhasil memperlihatkan hal ini, sehingga konflik antar etnis di wilayah dapat dihindari.

Perang Bangka

Penindasan-penindasan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda menyebabkan kesengsaraan yang luar biasa bagi rakyat pulau Bangka. Hal ini menyebabkan terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat pulau Bangka. Perlawanan yang dilakukan untuk menentang bangsa asing kulit putih merupakan sebuah perjuangan yang cukup panjang, yaitu selama sekitar 40 tahun. Perlawanan ini dimulai sekitar bulan Mei 1812 Masehi saat Inggris berkuasa dan terus berlanjut pada saat kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda dan berakhir sampai sekitar bulan Februari 1851 Masehi. Wiharyanto (2009:4) mengungkapkan akibat jatuhnya VOC, monopoli Belanda di Palembang tidak dapat dipertahankan sehingga pada 17 Mei 1812 Inggris memperoleh Bangka Belitung sebagai daerah kekuasaannya.

Perlawanan rakyat Bangka yang terjadi pada masa kekuasaan Hindia Belanda, dipimpin oleh Demang Singayudha berlangsung di daerah Kotaberingin dan di daerah Gudang dipimpin oleh Batin Tikal. Kemudian perlawanan besar rakyat Bangka yang lebih terorganisasi dipimpin oleh Depati Bahrin yang berhasil membunuh dan memenggal serta mengeringkan kepala Residen Belanda M.A.P Smissaert pada 14 November 1819. Tidak tinggal diam, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Kota Muntok sebagai pusat kekuatan pasukannya dan Pangkal Pinang sebagai pusat kekuatan militer pasukan Belanda karena Pangkal Pinang letaknya strategis, sehingga memudahkan pasukannya ke daerah – daerah pusat perlawanan rakyat. Strategi ini dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menumpas perlawanan-perlawanan rakyat Bangka.

Tidak lama kemudian, tentara Belanda melakukan serangan pertama pada 17 Agustus 1819 melalui darat dan laut yang dipimpin oleh

Kapten Age. Kemudian, dilanjutkan dengan serangan kedua pada September 1819 yang menyebabkan terjadinya pertempuran besar-besaran di Bangka. Pada saat itu, Bangkakota dipimpin oleh Kapten Laemlin yang membawa pasukannya sekitar 230 prajurit dari Pangkalpinang. Tidak hanya berhenti pada serangan di darat saja, serangan laut juga dilakukan oleh pasukan Belanda dengan empat buah kapal perang di bawah pimpinan Kapten Baker.

Seketika Bangka Kota dibumihanguskan oleh rakyat karena persediaan senjata yang minim dan rakyat menyingkir ke Kotaberingin dan Nyireh. Akibat dari kejadian ini menewaskan pihak Belanda sebanyak empat orang, 19 terluka, seorang perwira dan 45 prajurit mengalami kelaparan, dua perwira, dan 63 prajurit mengalami sakit, total 50 persen pasukan tidak mampu bertempur (Santosa, 2011:134)

Kegigihan perlawanan rakyat Bangka membuat pemerintah Hindia Belanda terpaksa harus melakukan berbagai upaya untuk menangkap Depati Bahrin, yaitu memberikan hadiah uang sebesar 500 ringgit bagi siapa yang berhasil menangkap Depati Bahrin, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian, pada tahun 1828 Masehi Pemerintah Hindia Belanda Batavia mengutus seorang juru runding bernama Launy untuk melakukan perundingan dengan Depati Bahrin. Pemerintah Hindia Belanda berjanji akan memberikan kompensasi tunjangan sebesar 600 gulden setahun kepada Depati Bahrin jika menghentikan perlawanan kepada Pemerintah Belanda. Upaya perundingan ini dilakukan karena pasukan militer Belanda kewalahan dalam menghadapi perlawanan rakyat dan ingin berkonsentrasi dalam menghadapi perlawanan rakyat di Pulau Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada 1825-1830 Masehi (Elvian, 2016b:78)

Memperimbangkan kepentingan rakyat Bangka yang lebih besar dan memikirkan dampak berlarut larutnya peperangan akan menyebabkan ladang terlantar dan rakyat Bangka terancam kelaparan, maka Depati Bahrin menerima tawaran perundingan damai tersebut. Depati Bahrin wafat pada 1848 dan dimakamkan di kawasan Mendara, tetapi ada juga yang

mengatakan Depati Bahrin dimakamkan di Lubuk Bunter Desa Kimak Kecamatan Merawang.

Setelah Depati Bahrin wafat, Perang Bangka tidak berhenti begitu saja. Akan tetapi, Perang Bangka selanjutnya dipimpin oleh Depati Amir, putera sulung Depati Bahrin. Perang ini merupakan perlawanan rakyat terbesar dan terkoordinasi serta meliputi seluruh pulau Bangka terhadap penjajahan Belanda. Gusnelly (2016:7) memaparkan bahwa perlakuan tidak adil dari pemerintah Belanda membuat salah satu toko Melayu, yaitu Depati Amir bersama dengan beberapa tokoh Tionghoa yang sudah melebur dengan masyarakat pribumi melakukan perlawanan, yang dipimpin oleh Depati Amir cukup menguras tenaga pasukan Belanda.

Amir menjadi Depati pada 1830 Masehi, yaitu menggantikan ayahnya di daerah Jeruk, yaitu nama sungai yang bermuara di pesisir barat Bangka. Perjuangan seluruh rakyat Bangka yang dipimpin oleh Depati Amir dimulai sejak penolakan jabatan depati yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1830 sampai Amir diasingkan ke Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur pada 1851 Masehi dan meninggal dunia di pembuangan dan dimakamkan di pemakaman Batukadera kampung Airmata, Kupang pada 1885 Masehi. Disadur dalam Pos-Kupang.com dengan judul *PT Timah dari Bangka Belitung Akan Kunjungi Makam Pahlawan Nasional Depati Amir di Kupang* menuliskan bahwa pascapenetapan Depati Amir sebagai Pahlawan Nasional, PT. Timah Tbk. turut memberikan apresiasi dengan berkunjung ke makam Depati Amir yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Fakta-fakta historis menjelaskan bahwa perlawanan yang dipimpin oleh Depati Amir merupakan gerakan sosial dan moral dari seluruh masyarakat Pulau Bangka. Hal ini dilakukan karena ingin mengubah situasi yang penuh dengan penderitaan, ketidakadilan, kesengsaraan, dan ketidakpastian yang dialami oleh mereka selama penindasan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Hal yang sama juga diungkapkan dalam jurnal Erman (2010:9) mengungkapkan bahwa patut dicatat solidaritas antar etnik semakin kuat antara penambang Tionghoa dengan orang-

orang Melayu Bangka yang tergabung dalam gerakan perlawanan Depati Bahrin dan Depati Amir, ketika kedua etnik ini dirugikan dengan sistem monopoli dalam eksploitasi dan pemasaran timah oleh pemerintah Belanda. Jika ditelusuri, ada beberapa hal yang menyebabkan perlawanan Bangka ini dilakukan, yakni: (1) penyatuan administrasi pemerintahan dan pertambangan; (2) peraturan monopoli perdagangan timah; dan (3) kerja paksa.

Penyatuan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh kolonial Belanda menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan karena pejabat-pejabat pemerintah kolonial Belanda lebih mengutamakan atau mementingkan urusan pertambangan daripada memerhatikan pemerintahan dan kepentingan rakyat. Hal ini dilakukan karena dianggap lebih menguntungkan bagi kepentingan pribadi mereka.

Ada sekitar 250 tambang timah yang menghasilkan jutaan gulden bagi kemakmurnan negeri Belanda dan menghasilkan kekayaan pribadi bagi pejabat pemerintahan. Komoditas timah pada pertengahan abad ke-19 merupakan komoditas eksporter besar ketiga setelah kopi dan gula. Timah Bangka menjadi tambang emas pada 1926, Bangka Tin Winning Bedrijf (BTW) memperkirakan keuntungan kasar yang diperoleh sebesar *f 400 juta* dalam Sembilan puluh tahun pertama yaitu dari tahun 1820-1910. Selain itu, dalam 15 tahun berikutnya keuntungan yang diperoleh sebesar *f 350 juta* (Heidhues, 1992:128-129). Oleh karena itu, kebanyakan pejabat kolonial Belanda yang bekerja di Pulau Bangka beranggapan, bahwa mengembangkan perdagangan, pertanian dan kerajinan rakyat akan merugikan sektor pertambangan. Akan tetapi, hal ini akhirnya membuat penduduk pribumi Pulau Bangka dikondisikan oleh Belanda hanya bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saja seperti membuat arang untuk keperluan penambangan timah, membuat atap dari rumbia (daun kelapa kering) sedangkan perempuan pribumi Bangka bekerja menjual kebutuhan makanan dan pakaian yang diantar kepada pekerja-pekerja di penambangan timah. Orang laut pribumi Bangka bekerja mencari teripang, ikan, dan rumput laut untuk ditukar dengan beras, garam, dan pakaian

Monopoli pertambangan timah ini terjadi pada 1819 Masehi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, dan kecurangan dalam tata niaga timah. Penetapan harga timah yang berbeda antara harga resmi timah dengan yang berlaku di pasaran bebas yang sangat mencolok serta penyelundupan dan penjarahan terhadap parit-parit oleh perompak di sekitar perairan pulau Bangka menyebabkan terjadinya kekacauan di berbagai pelosok Pulau Bangka.

Dalam mengatasi penyelundupan timah yang terjadi secara besar-besaran, maka Keresidenan Bangka membuat peraturan agar pelayaran dari dan menuju Pulau Bangka hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan ibu kota Muntok. Selain itu, perahu-perahu pribumi dilarang berlayar dan berhubungan dengan daerah-daerah yang ada di luar Pulau Bangka. Kebijakan ini membuat sulitnya penyediaan bahan pangan termasuk garam. Barang kebutuhan tersebut diperoleh dengan harga yang sangat tinggi karena bahan pangan harus didatangkan Pemerintah Belanda dari luar Pulau Bangka. Pemerintah Hindia Belanda memperoleh banyak keuntungan dari penjualan kebutuhan bahan pangan ini dan keuntungan penjualan paling besar diperoleh dari hasil penjualan kepada para pekerja tambang, yaitu orang Cina yang kemudian terikat hutang kepada tambang sehingga kontrak kerja mereka di parit penambangan terus diperpanjang sampai hutang-hutang mereka lunas.

Perlawanan rakyat Bangka berikutnya dilakukan karena kerja paksa yang diwajibkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kerja paksa yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan karena tanpa dibayar. Rakyat Bangka dipaksa untuk membuat dan merawat jalan, membuat dan memperbaiki jembatan, memikul tandu pejabat Belanda, dan mengangkut logistik tentara. Selain itu, mereka harus menjadi kurir pengantar surat dengan berjalan kaki dan tanpa diupah. Berbagai macam kerja paksa tersebut kemudian menyebabkan kegiatan berladang sebagai mata pencaharian dan sumber pangan masyarakat pribumi Bangka terlantar dan ancaman kelaparan terjadi dimana - dimana.

Sejak penguasaan timah oleh Pemerintah Belanda, salah satu mata pencaharian rakyat

Bangka menjadi hilang. Sebelumnya rakyat cukup sejahtera ketika Sultan Palembang Darussalam memberikan kebebasan kepada rakyat Bangka untuk menambang timah serta menjualnya kepada kesultanan.

Perlakuan yang buruk dari Pemerintah Hindia Belanda juga tidak hanya diterima oleh etnis Melayu di Pulau Bangka, tetapi etnis Tionghoa yang bekerja di parit pertambangan sebagaimana layaknya budak juga menerima perlakuan yang sama. Kuli tambang yang sudah terikat kontrak harus bekerja terus menerus dan tidak boleh meninggalkan lokasi pertambangan. Janji-janji yang seharusnya diterima oleh para penambang tampak bertolak belakang, yaitu kontrak kerja yang mereka tanda tangani seolah-olah tiada habis-habisnya karena keterikatan hutang para pekerja tambang kepada kepala-kepala parit pertambangan. Hutang ini terjadi karena para pekerja tambang timah dari Tiongkok menerima gaji yang sangat kecil serta potongan-potongan yang dikenakan untuk pembayaran cicilan biaya keberangkatan dari daerah asal ke Pulau Bangka dan biaya pemenuhan kebutuhan relatif mahal.

Selain itu, pembayaran gaji yang diterima juga tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani, yaitu gaji para pekerja tambang yang seharusnya dibayar dengan menggunakan uang logam spanyol, dibayar dengan uang logam Belanda. Uang logam Belanda hanya dapat digunakan pada satu distrik saja dan tidak bisa digunakan di distrik yang lain. Hal ini membuat Etnis Tionghoa tidak bisa mengirimkan uang kepada keluarga mereka yang ada di Tiongkok atau mengumpulkan uang untuk pulang ke tempat asal mereka.

Perlakuan buruk yang dialami tidak hanya sampai di situ saja, pembangunan fasilitas yang seadanya dan kurangnya perhatian terhadap kebersihan, kesehatan, dan makanan yang disediakan menyebabkan mewabahnya penyakit, seperti beri-beri, kolera, dan demam yang menyebabkan banyaknya kematian pada pekerja tambang etnis Tionghoa di Bangka.

SOLIDARITAS TIONGHOA DAN MELAYU

Penindasan dan penderitaan serta perasaan senasib dengan pribumi di Bangka menyebabkan munculnya rasa persatuan dan solidaritas untuk bersama-sama berjuang dalam melawan Belanda ketika mereka diajak untuk ikut berperang. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Depati Amir semakin meluas karena dibantu oleh para demang dan batin yang ada di Pulau Bangka, seperti Demang Suramenggala, Batin Ampang, Batin Ketapik, Batin Gerunggung, Batin Jebus, Batin orang-orang Sekak, Batin Nyalau, Batin Bakung, Batin Tjepurak, Batin Penagan dan Batin Maras.

Kondisi sejarah seperti ini juga sudah terjadi di beberapa daerah, yaitu di kota Lasem. Atabik (2016:6) menjelaskan bahwa solidaritas dan kerja sama antara warga pribumi Jawa dan Etnis Tionghoa terjadi dengan indah di tanah Lasem ini. Persaudaraan antara orang Lasem merupakan warisan Perang Kuning dari Oei Ing Kiat, Panji Margono, dan Kyai Baidhawi.

Tidak hanya mendapat bantuan dari para *demang*, Depati Amir juga mendapat bantuan dari kepala-kepala parit penambangan timah berupa senjata dan mesin yang dibeli dari Singapura terutama datang dari orang-orang etnis Tionghoa, seperti Bun A Tjong kepala parit kampung Air Duren, Ho Tjing kepala parit Seruk, Tjin Sie kepala parit Singli Bawah, Kai Sam, dan Ko Su Sui. Selain itu, bantuan yang datang juga berasal dari beberapa orang mualaf seperti Raman, Aim, dan King Tjoan, para *lanun* atau perompak laut dari Lanao Mindanao, Kerajaan Lingga, dan Kesultanan Palembang Darussalam

Berdasar laporan Residen Bangka dalam *Algemeen Verslag der Residentie Bangka over het Jaar 1850*, Bundel Bangka No. 41, disebutkan bahwa “di antara beberapa orang Tionghoa selalu ada penghinaan terhadap kekuasaan kita. Hal ini terbukti dari apa yang muncul dalam laporan pada 26 Januari 1851 Nomor XIV/A mengenai hubungan beberapa orang Tionghoa dengan Depati Amir.” Dalam laporan Residen Belanda, bisa dilihat bahwa sudah terjalin hubungan dan ikatan yang begitu erat sejak lama antara Depati Amir dengan orang-orang Tionghoa terutama yang menyangkut urusan pertambangan. Hubungan ini semakin erat terjalin pada saat menghadapi kekuasaan Kolonial Belanda di

Pulau Bangka yaitu antara kalangan elite orang Tionghoa (pemilik-pemilik saham kongsi, kepala-kepala parit) maupun elite pribumi Bangka (para depati, batin, dan krio) yang mengalami pemberlakuan monopoli oleh Belanda yang merugikan dan mengancam ekonomi mereka.

Setelah memahami perjuangan etnis Tionghoa dan Melayu dalam perang Bangka yang dipimpin oleh Depati Amir, perjuangan pembentukan Bangka menjadi provinsi juga perlu dibahas dalam artikel ini karena sikap solidaritas etnis Tionghoa dan Melayu tidak terhenti pada saat Perang Bangka saja. Akan tetapi, sikap solidaritas itu juga tetap dipertahankan pada saat Bangka berjuang untuk menjadi provinsi.

Sikap solidaritas antara masyarakat Bangka ini juga tidak terlepas dari hubungan yang terjadi secara turun temurun, yaitu mulai dari perang melawan penjajahan Belanda sampai dengan Perang Bangka. Sikap kerukunan antara Etnis Tionghoa dan Melayu juga terjadi di Kota Singkawang. Irfani (2016:10) mengungkapkan dari fakta sejarah dapat dipahami bahwa ada kerukunan di Singkawang bersifat asosiatif yang selalu terpelihara secara turun temurun, berkelanjutan bahkan sudah seperti budaya untuk sebagian masyarakat asli Kota Singkawang.

Oleh karena itu, para sesepuh dan tokoh masyarakat Bangka Belitung saat itu tentunya sudah memikirkan bahwa perubahan dan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung akan lebih dapat digenggam jika memisahkan diri.

PEMBENTUKAN PROVINSI BANGKA

Perjuangan Provinsi Bangka Belitung dimulai tahun 1956 sampai era reformasi Tahun 2000. Hal ini terdorong oleh keinginan yang kuat untuk lebih meningkatkan peran serta Bangka Belitung dalam pembangunan nasional di segala bidang, khususnya dengan meningkatkan kualitas ekonomi, sosial, dan budaya daerah Bangka Belitung secara mandiri.

Senada dengan Yandra (2004:45) yang memaparkan pemekaran wilayah merupakan hal yang termasuk baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dimana untuk pertama kalinya pada tahun 2000, munculnya Provinsi Bangka Belitung yang melepaskan diri dari

Sumatera Selatan. Selain itu, ada beberapa faktor yang mendorong sebuah wilayah ingin melepaskan diri dari wilayah induknya atau pembentukan provinsi baru, yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan serta faktor lain yang menunjang otonomi daerah. Pemekaran wilayah akan meningkatkan pelayanan, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan pembangunan daerah. Dalam situs resminya, pemerintah daerah menyampaikan apa yang terjadi jika Bangka Belitung (Babel) tidak memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan akan membuat Bangka tidak banyak mengalami perubahan.

Tidak hanya itu saja, Alfirdaus & Zakiah (2006:12) juga memaparkan saat Babel masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, keuntungan dalam hal sektor wisata lebih banyak diserap oleh Provinsi sehingga masyarakat tidak bisa bebas banyak bagi pengembangan daerahnya. Akan tetapi, setelah Babel menjadi provinsi sendiri, masyarakat pun lebih memiliki kekuasaan dalam mengembangkan potensi pariwisatanya.

Selain itu, dalam wawancara yang dilakukan secara langsung dengan Amung Tjandra sebagai salah satu yang ikut berjuang dalam pembentukan Bangka menjadi Provinsi menjelaskan jika Bangka ini tidak menjadi provinsi, Bangka akan menjadi pulau hantu. Setelah dikeruk timahnya kemudian akan dibiarkan begitu saja.

Oleh karena itu, selama puluhan tahun masyarakat Babel sangat bersemangat untuk meningkatkan status daerahnya menjadi provinsi sendiri, yaitu lepas dari Sumatera Selatan. Akan tetapi, sempat terjadi persoalan, yaitu pembagian kekuasaan antara Bangka dan Belitung jika sudah menjadi provinsi. Selanjutnya, muncul kesepakatan yang disebut Ikrar Tanjung Kelayang yang sampai sekarang menjadi pedoman penting dalam kesepakatan persamaan hak antara Bangka dan Belitung. Salah satu deklarator Tanjung Kelayang itu adalah Amung Tjandra yang mengatakan bahwa tanpa adanya Ikrar Tanjung Kelayang ini, rasanya tidak akan ada Provinsi Bangka Belitung. Tanjung Kelayang mempunyai sejarah dalam pembentukan provinsi Babel dan di sanalah lahir ikrar pembentukan provinsi yang dimotori oleh tokoh-tokoh pejuang.

PENINGKATAN STATUS MENJADI PROVINSI BANGKA BELITUNG

Setelah adanya kesepakatan dan penandatanganan atas Ikrar Tanjung Kelayang, dilakukan pembentukan forum-forum, salah satunya adalah Presidium Perjuangan Peningkatan Provinsi Bangka Belitung.

Anggota dalam forum ini adalah Jahja Jakob, Rahim Sjarief, Amung Tjandra, Islam, Syamsuri Djalil. Para pengurus Presidium ini harus rela meluangkan waktunya mondar-mandir, yaitu dari Bangka ke Jakarta. Semua itu dilakukan demi sebuah perjuangan untuk Bangka Belitung. Perjuangan yang harus dilewati tidaklah mudah karena minimnya dana yang diperoleh membuat mereka harus berhemat biaya. Oleh karena itu, untuk menuju bandara mereka harus menumpang becak, tetapi hal ini tidak menyurutkan semangat mereka meskipun dengan fasilitas dan dana yang begitu minim.

Proses yang harus dilewati para personalia tidak mudah. Belum lagi setelah berlangsungnya Pemilu, Gubernur Sumatera Selatan, yaitu Asnawi Mangku Alam pun bermain mata dengan orang kepercayaan Presiden Soeharto, Ali Moertopo. Saat itu Ali datang langsung ke Pulau Bangka dan berpidato di halaman pusat kantor PN. Dalam pidatonya berkata: "Siapa yang berkeinginan untuk mendirikan Provinsi baru, silahkan dirikan Provinsi itu di Laut sana!!" Tindakan Ali Moertopo membuat semangat perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung sempat terhenti pada saat itu karena para kepala daerah dan para tokoh pejuang yang berasal dari PNS mendapat ancaman akan dimutasikan ke Palembang tanpa pekerjaan. Akibat kondisi ini dan kuatnya pengaruh pemerintah pusat melalui Ali Moertopo, perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung generasi kedua pun terpaksa sementara harus berhenti. Pada saat itu adalah masa Orde Baru, hal ini membuat mereka paham bahwa para pejuang dapat dengan mudah dituduh sebagai pemberontak bahkan dan dijebloskan ke dalam penjara.

Perkataan dan tindakan tegas Ali Moertopo seolah terasa kejam bagi masyarakat Bangka, tetapi hal ini dilakukan sesuai dengan

peranan Ali Moertopo dalam mewujudkan stabilitas nasional pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, dalam menjaga stabilitas Nasional dibutuhkan kekuatan militer yang dilapisi dengan langkah-langkah intelijen, karena tanpa hal tersebut, akan sangat mudah terjadi pemberontakan ataupun serangan dari negara lain. Perkembangan intelijen Indonesia, tidak bisa lepas dari nama Ali Moertopo karena peranan Ali Moertopo di bidang politik, yaitu untuk mewujudkan stabilitas nasional Indonesia dan membantu jalannya perpolitikan di awal Orde Baru dalam melancarkan strategi politik agar terciptanya stabilitas politik pada masa itu.

LANGKAH GENERASI REFORMASI

Setelah lama tidak terdengar suara untuk memisahkan diri dari Sumatera Selatan, muncul tiga penggerak perjuangan generasi ketiga. Mereka yaitu, Johan Murod, Eddy Jang, dan Agus Adaw dimana mereka dengan rajin berdiskusi dengan para senior termasuk Amung Tjandra. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemuda ini karena beberapa tokoh masyarakat di Bangka Belitung sendiri lebih banyak kontra daripada pro. Seakan tidak mau peduli terhadap gunjingan dan cemoohan masyarakat kala itu, Johan Murod cs terus mengajak masyarakat luas agar turut bersama-sama dalam perjuangan menuntut Bangka menjadi Provinsi.

Perjuangan generasi Reformasi yang dilakukan ternyata tidak berjalan mulus karena dana menjadi salah satu kendala dalam menunjang berbagai pertemuan Presidium Pembentukan Provinsi Bangka Belitung di Jakarta. Akhirnya, kondisi ini membuat para pejuang berninisiatif untuk membuat malam penggalangan dana yang dinamakan "Galang Dana Perjuangan" dan mengundang 10 orang ibu-ibu masyarakat Bangka Belitung yang aktif dan bisa diajak kerja sama untuk perjuangan pembentukan Bangka Belitung.

Salah satu etnis Tionghoa yang ikut dalam pengumpulan dana ini adalah ibu Rita Benjamin (Lie Su Djin). Dalam perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung di era generasi ketiga, masyarakat Bangka yang berada di Jakarta sering

kali berkumpul. Saat itu, Rita Benjamin adalah satu-satunya perempuan yang berasal dari etnis Tionghoa. Tetapi, hal itu tidak menyurutkan semangat dan cinta beliau terhadap daerah sendiri untuk turut bersama masyarakat Melayu demi perjuangan terbentuknya Bangka Belitung menjadi Provinsi. Selain itu, teman-teman yang lain tidak pernah membedakan Ibu Rita soal etnis karena saat perjuangan itu tidak ada istilah Tionghoa ataupun Melayu, yang ada hanyalah Bangka Belitung. Hal ini senada dengan yang diungkapkan dalam Sulaiman (2009:6) etnis di Kepulauan Bangka melahirkan keberagaman budaya yang memiliki pengaruh terhadap interaksi yang terjalin dalam masyarakatnya yaitu pembauran antarkelompok etnis menyebabkan keharmonisan sosial yang ditunjukkan dengan tidak adanya pembedaan antara masyarakat Melayu setempat dengan kelompok etnis Tionghoa.

Para pejuang pembentukan Provinsi Bangka Belitung mengundang masyarakat luas untuk menghadiri hari bersejarah pembangunan Provinsi Bangka Belitung. Pada saat itu dibagikanlah selebaran yang berupa ajakan kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung dengan salam “Fan Ngin Thong Ngin Jit Jong” yang ditandatangani oleh H. Romawi Latief (mewakili generasi pertama, 1956, Amung Tjandra (mewakili generasi kedua, 1970), Johan Murod dan Agus Adawa (mewakili generasi ketiga, 2000).

Setelah melalui proses yang begitu panjang dan sulit, yaitu mulai dari dana dan tenaga yang tidak sedikit serta melibatkan banyak masyarakat, akhirnya pada tanggal 21 November 2000, dari podium ruang Nusantara V Gedung DPR RI Senayan Jakarta, naskah Undang-Undang No 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibacakan. Setelah membacakan naskah Undang-Undang tersebut, pimpinan Sidang Paripurna mengetok palu pertanda disahkannya Bangka Belitung menjadi provinsi ke-31 melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2000.

Proses perjuangan pembentukan Bangka Belitung menjadi sebuah provinsi yang begitu panjang dan sulit yang dialami masyarakat Bangka khususnya para pejuang yang ikut menyumbangkan pikiran dan tenaga mereka,

membuktikan adanya sikap persatuan yang begitu nyata terbangun di antara masyarakat Bangka yang berbeda etnisitas. Pembentukan provinsi merupakan buah perjuangan dari seluruh komponen masyarakat Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang dibuktikan dengan terbitnya UU Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 21 November 2000. Para pejuang menyerukan bahwa pembentukan Provinsi Bangka Belitung dapat menjadi gerbang dan jembatan emas bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi serumpun sebalai. Maksud pernyataan jembatan emas menurut Johan, salah satu pejuang pembentukan Provinsi Bangka Belitung Generasi ketiga dalam buku biografi *Amung Tjandra Inspirator* adalah *fan ngin thong ngin jit jong* yang hidup rukun dan damai saling mendidik, mengasihi, dan menjaga dalam membangun negeri.

SIMPULAN

Fenomena bersatunya etnis Tionghoa dan Melayu dalam Perang Bangka dan pemekaran daerah Bangka untuk melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Selatan menjadi sebuah sejarah yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Nilai-nilai sejarah yang ada dalam Perang Bangka yang dipimpin oleh Depati Amir menggambarkan adanya perasaan senasib dan terasingkan yang sama-sama dialami oleh etnis Tionghoa dan Melayu pada masa penjajahan. Hal ini yang kemudian menimbulkan sikap yang begitu solid di antara kedua etnis tersebut. Tidak hanya sampai pada sejarah perang Bangka saja sikap solidaritas ini terbentuk, tetapi pada saat Bangka melakukan pemekaran daerah yaitu melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Selatan. Perjuangan ini juga tidak terlepas dari sumbangsih para pejuang baik dari etnis Tionghoa dan etnis Melayu yang berjuang agar Bangka Belitung menjadi provinsi yang sejahtera dalam segala bidang.

Setelah dimulainya operasi militer pada Oktober 1850, Amir dengan orang Tionghoa Bong Atjing, Kepala Tambang Doerin Kotjeng, Kepala Tambang Seroe, Tinsie, Kepala Tambang Singlie Bawah, Ko So Sie mengadakan pertemuan di rumah Bong Atjing untuk membahas apa saja

yang akan dilakukan oleh mereka. Proses pergaulan antara orang Tionghoa dengan Melayu terjalin dengan tidak lagi memandang perbedaan SARA (Nata, Tanggok, Madjid, & Rumandi, 2016:131)

Latar belakang sejarah yang sama inilah yang pada akhirnya membuat masyarakat Bangka memiliki semboyan hidup yang mereka pegang sampai saat ini yaitu *Thong Ngin Fan Ngin Jit Jong* yang memiliki makna Etnis Melayu dan Tionghoa itu sama atau setara. Hal ini juga yang mampu menjadikan masyarakat Bangka, yaitu Etnis Tionghoa dan Melayu mampu mengabaikan permasalahan etnisitas di antara keduanya dan hidup jauh dari konflik etnisitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Apresiasi setinggi-tingginya untuk semua pihak yang berkontribusi untuk penelitian ini. Utamanya ditujukan bagi Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia dan Program Hibah Penelitian Tesis Magister Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI) berdasar keputusan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 sebagai pemberi kesempatan yang menunjang penelitian ini hingga selesai. Selanjutnya, terima kasih tidak terperi kami kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berikut dengan para laskar pejuang pemekaran wilayah yang bersedia dilibatkan sebagai narasumber. Tidak lepas ucapan terima kasih juga kepada Redaksi *Jurnal Sejarah Citra Lekha* yang memberikan wadah bagi aktualisasi bidang ilmu komunikasi berkontribusi dalam membumikan realitas keharmonisan antara etnis Tionghoa dan Melayu yang tersaji secara ilmiah melalui penelusuran sejarah terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

CATATAN

¹Hak Oktroi disahkan pada 20 Maret 1602 meliputi hak monopoli VOC untuk berlayar di wilayah sebelah Timur Tanjung Harapan dan hak

kedaulatan (*souvereiniteit*), sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara.

²Monopoli perdagangan timah juga mengikat Sultan Palembang untuk merampas timah hasil selundupan dan menghukum mati penyelundupnya

³VOC dibubarkan karena perubahan di Eropa di bidang politik yang lebih demokratis dan perubahan ekonomi ke arah perdagangan bebas, kemudian VOC mengalami kebangkrutan dengan hutang sekitar 136,7 juta Gulden

⁴Kapitulasi Tuntang adalah perjanjian penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Britania Raya di sebuah desa yang bernama Tuntang, sekarang berada di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Perjanjian Tuntang isinya antara lain, bahwa Inggris berkuasa atas wilayah bekas jajahan Belanda termasuk wilayah Kesultanan Palembang Darussalam yaitu Pulau Bangka

⁵Sepucuk surat Raffles tertanggal 3 Juli 1818 kepada Dewan Rahasia East India Company "*it is much to be regretted that the island of Banca was ever ceded to the Dutch. Could this important station be regained, in payment for the heavy sums due by the Dutch Government on the close of the Java accounts, its advantages to the British Government would abundantly repay the amount foregone. Possesing Banca in disputed sovereignty, it would be the seat of our eastern Government...*" (Bakar, 1969:14)

(Hal yang sangat disesalkan bahwa Pulau Bangka peranh diserahkan kepada Belanda, mungkinkah kedudukan penting ini didapatkan kembali sebagai bayaran atas sejumlah besar yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda. Memiliki Bangka dalam kekuasaan yang diperdebatkan, akan menjadi kursi Pemerintahan Timur kita) ..."

⁶Bahrin adalah putera Depati Karim berkedudukan di tempat yang bernama jeruk. Dalam peperangan antara VOC dan kerajaan Lingga, Depati Karim memihak kepada Panglima Rahman, pemimpin angkatan perang Lingga yang datang menyerang Bangka. Akan tetapi, dalam salah satu pertempuran, Depati Karim tewas. Putera Depati Bahrin yang waktu itu masih kecil dibawa oleh Panglima Rahman ke Lingga dan dirawat sebagai putera sendiri. Setelah dewasa,

Bahrin pulang ke Bangka dan kemudian menghadap kepada Sultan Palembang. Ia lalu diangkat oleh sultan menjadi Depati di Jeruk menggantikan bapaknya.

⁷Merujuk pada pengangkatan *depati-depati* sebelumnya dan pengangkatan depati di Pulau Belitung, bahwa depati diangkat dari keturunan atau putera laki-laki tertua, bila tidak ada, maka putera laki-laki depati yang lain atau saudara laki-laki *depati* atau anak saudaranya atau cucunya atau cucu depati tertua dari sebelah laki-laki.

⁸Perkiraan jumlah timah yang dihasilkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dari Pulau Bangka yang diperoleh dari olahan berbagi sumber dan data. Sejak 1810 sampai 1819 rata-rata produksi timah per tahun sebesar 20.000 pikul atau total produksi sekitar 200.000 pikul. Kemudian, produksi timah antara 1820 sampai 1829 rata-rata setahun sebesar 25.000 pikul selanjutnya antara 1830-1839 rata-rata produksi timah sebesar 60.000 pikul setahun. Selanjutnya antara 1840-1850 produksi timah rata-rata setahun 65.000 pikul. Produksi timah tersebut terus meningkat antara 1852-1913 dan telah diproduksi timah dari Pulau Bangka sejumlah 7.186.605. Kemudian dari 1914 hingga 1941 telah diproduksi timah sebesar 7.379.765 *pikul*. Jadi total selama kekuasaan Hindia Belanda di Pulau Bangka telah dikeruk kekayaan timah sekitar 16.366.370 *pikul* atau 981.982.200 kilogram atau setara dengan 981.982 ton timah.

⁹ Harga timah pada masa itu senilai 9 ringgit sama dengan harga timah 1 *pikul*.

¹⁰Ikrar Tanjung Kelayang merupakan bentuk awal semangat Bangka Belitung menjadi provinsi. Lokasi Tanjung Kelayang berada di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung

¹¹ Uang perak Spanyol sering dilebur kembali menjadi perak sehingga persediaan uang perak di dunia menjadi menipis

¹⁰ Senjata dan amunisi termasuk mesiu merupakan barang yang diperdagangkan secara bebas di Singapura, yang berasal dari Eropa, termasuk dari Negeri Belanda. Kemudian, atas inisiatif Inggris, Belanda pada 1863 melarang perdagangan senjata beserta amunisinya di Singapura. Hal ini dilakukan untuk mengatasi perlawanan-perlawanan pribumi di Nusantara dan merajarelaya bajak laut di Selat Malaka dan

Selat Bangka yang dapat memiliki senjata dengan mudah.

¹¹Orang-orang Lingga dengan menggunakan perahu bercap dari Raja Lingga menyerang wilayah pesisir di berbagai Teluk, yaitu di Teluk Kelabat, di Teluk Jebus, dan di Pantai Timurlaut perairan Sungailiat. Kemudian, Pemerinah Hindia Belanda mengirimkan kapal uap Onrust dan Tjipanas bersama dua perahu bersenjata untuk mengejar orang-orang Lingga tersebut.

¹²Amung Tjandra merupakan salah satu pejuang pembentukan Provinsi Bangka Belitung keturunan etnis Tionghoa. Kisah hidup beliau mulai dari keluarga dan perjuangannya dibuat dalam satu buku biografi yang berjudul *Inspirator Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung* oleh Ahmadi Sofyan.

¹³Istilah *tanur-tanur* merupakan tungku yang digunakan untuk peleburan timah.

¹⁴*Agent to the Governor-General*, yaitu sebagai wakil gubernur jenderal untuk urusan dengan negeri-negeri Melayu. Tugas utamanya adalah menyiapkan data-data yang berhubungan dengan seluk beluk tanah Melayu serta berkoordinasi sekaligus menggalang dukungan para penguasa lokal.

REFERENSI

- Abbas, I. (2014). "Memahami Metodologi Sejarah antara Teori dan Praktek". *Jurnal Etnohistori*, Vol. 1 (1): 23–41.
- Alfirdaus, L. K., & Zakiah, F. (2006). "Akar Pemekaran dan Prospek Pembangunan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung." Makalah Seminar Internasional Dinamika Politik Lokal, Percik-Ford Foundation.
- Atabik, A. (2016). "Percampuran Budaya Jawa dan Cina: Harmoni dan Toleransi Beragama Masyarakat Lasem." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 11 (1): 1–11.
- Elvian. A. (2009). *Setengah Abad Kota Pangkal Pinang sebagai Daerah Otonom*. Pangkalpinang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang.
- Elvian. A. (2016a). *Kampoeng di Bangka* (Vol. 1). Pangkal Pinang: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pangkal Pinang.
- Elvian. A. (2016b). *Perang Bangka (Tahun 1812-*

- 1851 Masehi). Pangkal Pinang: CV. Talenta Surya Perkasa.
- Bakar, A. A. (1969). *Bahrin-Amir-Tikal Pahlawan Nasional Jang Tak Boleh Dilupakan*. Djakarta: Jajasan Pendidikan Rakjat Bangka.
- Darmawan, W. (2010). "Potret Kehidupan sosial-Ekonomi di Kabupaten Indramayu (Tinjauan Historis tahun 1970-2007)". *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 11 (1): 142–150.
- Farida. (2007). "Konflik Politik di Kesultanan Palembang (1804-1821)". *Jurnal Sejarah Lontar*, Vol. 4 (2): 75–80.
- Gusnelly. (2016). "Sejarah Pengelolaan Timah dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Tambang Timah di Bangka Belitung". *Patrawidya*, Vol. 17 (3): 155–176.
- Haboddin, M. (2012). "Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal." *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 3 (1): 116–134.
- Hazmirullah. (2016). "Surat Balasan Sultan Sepuh VII Cirebon untuk Raffles: Kajian Strukturalisme Genetik." *Metasatra: Jurnal Penelitian Sastra*, Vol. 9 (2): 211–224.
- Heidhues, Mary F. Somers (1992). *Bangka Tin and Mentok Pepper: Chinese Settlement on an Indonesian Island*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Idi, A. (2012). Harmoni Sosial: Interaksi Sosial "Natural-Asimilatif" antara Etnis Muslim Cina dan Melayu-Bangka". *Thaqaffiyat*, Vol. 13 (2): 361–383.
- Irfani, A. (2016). "Pola Kerukunan Melayu dan Tionghoa di Kota Singkawang." *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, Vol. 12 (1), 1–16.
- Jayanti, Y. D., Nurdin, & Ardiansyah, A. (2014). "Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat Antara Indonesia dan Malaysia (Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat)." *Jurnal Hukum*, (June): 1–22.
- Kathirithamby-Wells, J. (2009). "Peninsular Malaysia in the Context of Natural History and Colonial Science." *New Zealand Journal of Asian Studies*, Vol. 1 (June): 337–374.
- Kavin, R. (2016). "Politik Lokal di Bangka Belitung Antara Timah dan Etnis Tionghoa". *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. 8 (2): 75–92.
- Marta, R. F. (2018). "Perjuangan Multikulturalisme Perhimpunan Indonesia Tionghoa dalam Perspektif Rekognisi Axel Honneth." *Jurnal Bricolage*, Vol. 4 (1): 23–31.
- Nata, H. A., Tanggok, M. I., Madjid, D., & Rumandi. (2016). *Permata Dari Surga; Potret Kehidupan Beragama di Indonesia*. (A. B. Basnur, P. M. Salim, I. Subehi, M. W. Sayuti, & M. M. Roup (Ed). Jakarta: Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Pageh, I. M. (2018). "Kearifan Sistem Religi Lokal dalam Mengintegrasikan Umat Hindu-Islam di Bali". *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 3 (2): 88–98. <https://doi.org/10.14710/jscl.v3i2.19411>
- Palmaya, K. R., Wakidi, & Ekwandari, Yu. S. (2017). "Kebijakan Landrent pada Masa Penjajahan Inggris di Jawa Tahun 1811-1816". Vol. 5 (8): 1–12.
- Permana, N. A. (2002). "Berita Penelitian Revitalisasi Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Konflik Etnis Menghadapi Otonomi Daerah." *Antropologi Indonesia*, Vol. 68(1): 18–21. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i68.3439>
- Ritaudin, M. S. (2017). "Teologi Politik Berbalut SARA antara Ambisi dan Konspirasi". *Jurnal Kalam*, Vol. 11 (1): 85–105. <https://doi.org/10.24042/klm.v11i1.1087>
- Santosa, I. (2011). *Legiun Mangkunegaran (1808 - 1942): Tentara Jawa - Perancis Warisan Napoleon Bonaparte*. Jakarta: Kompas.
- Satya, M. S., & Maftuh, B. (2016). "Strategi Masyarakat Etnis Tionghoa dan Melayu Bangka dalam Membangun Interaksi Sosial untuk Memperkuat Kesatuan Bangsa". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial (JPIS)*, Vol. 25 (1): 10–23. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i1.3667>
- Setiati, D. (2008). *Makanan Tradisional Masyarakat Bangka Belitung*. S. Rohana, (Ed). Tanjung Pinang: Departemen

- Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang.
- Sulaiman, A. (2009). "Kebijakan Partai Politik Terhadap Caleg Perempuan pada Pemilu 2009 di Bangka Belitung." *Jurnal Society*, Vol. 1 (1): 17.
- Susilowati, E., & Masruroh, N. N. (2018). Merawat Kebhinekaan Menjaga Keindonesiaan: Belajar dari Nilai Keberagaman dan Kebersatuan. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 3 (1): 13–19. <https://doi.org/10.14710/jscl.v3i1.17856>
- Theo, R., & Lie, F. (2014). *Kisah, Kultur, dan Tradisi Tionghoa Bangka*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Wiharyanto, A. K. (2009). "Perlawanan Indonesia terhadap Belanda pada Abad XIX". *Historia Vitae*, Vol. 23 (2): 1–29.
- Yandra, A. (2016). "Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematik dan Tantangannya di Indonesia." *Jurnal Niara*, Vol. 9 (2): 1–14.
- Zed, M. (2018). "Tentang Konsep Berfikir Sejarah." *Jurnal Pendidikan Sejarah & Kepala Pusat Kajian Sosial-Budaya & Ekonomi (PSKBE), Universitas Negeri Padang*, Vol. 13 (1): 54–60.
- Zein, A. B. (2000). *Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Insani.
- Kompas.com Melayu-Tionghoa Bersaudara Tanpa Sekat, 25 November 2011 dalam tautan:<https://edukasi.kompas.com/read/2011/11/25/03273151/melayu-tionghoa.bersaudara.tanpa.sekat?page=all>, diakses 18 May 2019.